

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) KOTA SURAKARTA

Indra Kertati¹

¹ FISIP UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, email: indra-kertati@untagsmg.ac.id

Abstract

Gender Development Index (GDI) and Gender Empowerment Index (GEM) are two measures that are always used to assess women's empowerment and development contributions to women. The size in the GDI is the same as the HDI which shows that the two indicators of impact in this development have equality that must be realized together. This study aims to analyze the development of GDI and GEM to determine the dominant factors affecting the existence of GDI and GEM. The results of the overall analysis of the achievement of the GDI and GEM of Surakarta City showed a position above the average achievement of Central Java Province. Even though it has decreased, several indicators that form the GDI and GEM show a better position than the position of Central Java and even nationally. In indicators that have contributed to the decline in the position of GDI and GEM, apart from being influenced by external factors, namely government policies, women's accessibility to development resources, as well as the shackles of stereotypes that women must be in the public sphere, cannot be avoided. Therefore, affirmative steps are needed to realize the achievement of GDI and GEM which continues to increase from time to time, through increasing the achievement of the forming indicators.

Keywords: indicators, women, index, development, gender, empowerment, city, Surakarta

Abstrak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang menunjukkan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama. Kajian ini bertujuan untuk mengurai perkembangan IPG dan IDG untuk mengetahui factor dominan yang mempengaruhi keberadaan IPG dan IDG. Hasil analisis secara keseluruhan pencapaian IPG dan IDG Kota Surakarta menunjukkan posisi diatas capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Meskipun mengalami penurunan, beberapa indikator pembentuk IPG dan IDG menunjukkan posisi yang lebih baik daripada posisi Jawa Tengah bahkan nasional. Pada indikator yang berkontribusi terhadap menurunnya posisi IPG dan IDG, selain dipengaruhi factor eksternal yaitu kebijakan pemerintah, aksesibilitas perempuan terhadap sumberdaya pembangunan, juga karena belenggu stereotype bahwa perempuan harus berada di ranah public, tidak dapat dielakan. Oleh karena diperlukan langkah-langkah afirmatif untuk mewujudkan pencapaian IPG dan IDG yang terus meningkat dari waktu ke waktu, melalui peningkatan capaian indikator pembentuk.

Katakunci : indikator, perempuan, indeks, pembangunan, gender, pemberdayaan, kota, Surakarta

1. PENDAHULUAN

Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamatakan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/ Walikota, untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing (P. RI 2000). Inpres ini menjadi bekal penting dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender yang bertujuan mencapai kesetaraan dan keadilan gender bagi masyarakat.

Sejak terbitnya Inpres 9 tahun 2000, berbagai peraturan yang mengatur secara operasional diterbitkan. Keputusan Mendagri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Ketentuan tersebut mengamanatkan dua hal penting yaitu: (1) pemerintah daerah menyediakan anggaran PUG dengan alokasi minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan (2) mengamanatkan terbentuknya lembaga yang menjamin berjalannya PUG di daerah. Permendagri ini telah dicabut.

Pada tahun 2008 dikeluarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan kemudian direvisi dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan tersebut menginstruksikan semua perangkat daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran setiap tahun. Berdasarkan Permendagri tersebut, ditegaskan tentang penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan harus responsif gender, baik dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan rencana kerja tahunan PD.

Amanat lain yang tidak kalah penting adalah yang tertuang di Rencana Pembangunan Pembangunan Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang secara ekplisit menempatkan pengarusutamaan gender sebagai arus utama dalam RPJMN. Empat pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari focus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan (Bappenas 2020).

Berbagai upaya kebijakan yang ditemui tidak lain untuk mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Sebagaimana diketahui dalam berbagai bidang pembangunan khususnya di daerah kesenjangan gender masih menganga. Beberapa daerah bahkan memiliki capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang relatif rendah. Beberapa kabupaten kota dan provinsi di Indonesia, pencapaian IPD dan IDG belum mampu megimbangi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Human Development Report (HDR) tahun 2019 melaporkan IPM Indonesia tahun 2018 berada pada level sedang dengan capaian sebesar 70,7 meningkat dibandingkan tahun 2017 yang dicapai sebesar 69,4 dan menempatkan Indonesia dalam kategori IPM tinggi di Asia

Tenggara. Peringkat Indonesia diantara negara-negara di dunia meningkat. Peringkat yang dicapai adalah ranking 113 tahun 2016 turun menjadi 116 tahun 2017 dan meningkat menempati urutan 111 pada tahun 2018 dari 189 negara. Pada tingkat Asia Tenggara, posisi IMP Indonesia termasuk dalam kategori tinggi dibawah Philipina, Thailand, Malaysia, Brunai Darusalam dan Singapore atau peringkat ke enam (UNDP 2019).

Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dilakukan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* capaian Indonesia tahun 2018 sebesar 93,7 meningkat tipis dibandingkan tahun 2017 sebesar 93,2. Posisi ini menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan IPG tinggi dan menempati ranking 103 dunia. Capaian pembentuk IPG yaitu *life expectancy at birth* (usia harapan hidup) perempuan dicapai sebesar 73,7 tahun dan laki-laki sebesar 69,4 tahun. Secara mengejutkan Indonesia telah mencapai *expected years of schooling* (harapan lama sekolah) yang sama antara laki-laki dan perempuan yaitu sebesar 12,9 tahun namun untuk *mean years of schooling* (rata-rata lama sekolah) masih menempatkan perempuan pada 7,6 tahun dan laki-laki telah mencapai 8,4 tahun. Kondisi rata-rata lama sekolah untuk perempuan naik 0,1 tahun dibandingkan capaian tahun 2017 sedangkan capaian laki-laki tetap sama dengan tahun yang lalu. Posisi *estimated gross national income per capita* (rata-rata pendapatan) Indonesia rendah yaitu perempuan tahun 2018 7,672\$ meningkat tajam dibandingkan tahun lalu yang mencapai angka 7,259\$. Sedangkan laki-laki 14,789\$ meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,385\$. Kondisi ini menunjukkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi semakin baik.

Berbagai bidang pembangunan masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif. IPG dan IDG pada tahun 2018 baru mencapai 90,99 dan 72,10, Gender Inequality Index Indonesia berada di peringkat 104 dari 162 negara yang diukur dan merupakan negara ketiga terendah di ASEAN, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan baru mencapai 51,89 persen dibandingkan laki-laki sebesar 83,13 persen. Partisipasi perempuan di lapangan kerja formal juga masih sangat rendah yaitu 34,22 persen dibandingkan laki-laki

yang sudah mencapai 65,78 persen (BPS 2019).

Capaian sebagaimana tersebut diatas bukan tanpa cela. Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat dengan spektrum yang semakin beragam. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik selama hidupnya. Jumlah KTP yang dilaporkan pada tahun 2018 meningkat 14 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 348.466 kasus menjadi 406.178 kasus. Dari jumlah tersebut, 71 persen adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 28 persen adalah kekerasan di komunitas seperti perkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual (K. P. P. dan P. A. RI 2017).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama 2019 sebanyak 6.574 kasus KDRT menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 10.316 kasus. Menurunnya kasus KDRT tak sebanding dengan meningkatnya kasus perkosaan. Tahun 2018 tercatat sebanyak 3.404 kasus, meningkat tahun 2019 meningkat sebanyak 4.730, atau 38,9 persen (<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kejahatan-pada-perempuan-di-2019-kdrt-turun-namun-pemerkosaan-meningkat.html>).

Kekerasan pada pekerja migran perempuan juga masih terjadi mulai dari pemberangkatan, transit, dan pemulangan (Komnas Perempuan, 2019). Jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga masih tinggi dengan modus yang semakin kompleks. Jumlah korban TPPO pada tahun 2018 mencapai 297 orang di mana 70 persen diantaranya adalah perempuan dan anak perempuan (Bareskrim Polri, 2019). Selanjutnya, perkembangan teknologi juga membuka peluang terjadinya kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang sebagian besar korbannya adalah perempuan (<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-peluncuran-kampanye-16-hari-anti-keker>).

Kondisi sebagaimana data tersebut terjadi juga di Kota Surakarta. Sebagaimana diketahui Kota Surakarta merupakan Kota yang dikelilingi oleh beberapa kabupaten kota dan menjadikan Kota Surakarta sebagai medan magnet. Sebagai sebuah pusanan kota, tekanan, pengaruh dari hinterland sangat mempengaruhi keadaan di Kota Surakarta.

Tercatat kesenjangan gender tidak berbeda jauh dengan kondisi Indonesia.

Catatan PT PAS (Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat) Solo Tahun 2017, terdapat 87 kasus dengan rincian 33 kasus perempuan dan 54 kasus anak-anak, tahun 2018 ada 66 kasus dengan rincian 21 kasus perempuan dan 45 kasus anak-anak. Tahun 2019 mencapai 67 kasus terdiri dari perempuan sebanyak 21 kasus dan kekerasan terhadap anak mencapai 46 kasus. Persoalan lain tentang perceraian juga memprihatinkan. Cerai Talak tahun 2019 mencapai 275 kasus, namun gugat cerai hamper 4 kali lipat sebesar 812 kasus. Ini menandakan terdapat persoalan dalam keharmonisan dalam rumah tangga. Dispensasi nikah mencapai 70 kasus, artinya anak yang harusnya belum kawin, terpaksa harus menikah.

Berbagai persoalan sebagaimana tersebut diatas berdampak pada capaian kesetaraan dan keadilan gender yang terukur dari capaian IPG dan IDG. Kota Surakarta sebagai Kota budaya memiliki pekerjaan rumah yang besar yaitu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kesetaraan perempuan terhadap laki-laki.

Tujuan analisis IPG dan IDG ini adalah untuk memperoleh gambaran pencapaian dan menguak factor pemicu perkembangan IPG dan IDG. Pemilihan Kota Surakarta dibandingkan Kota lain, karena Kota Surakarta tahun 2018 merupakan pencapai IPG tertinggi di Jawa Tengah.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder. Sebuah tinjauan literatur menunjukkan bahwa ada sejumlah keuntungan dari analisis data sekunder. Andrews mengutip Heaton (2004) menunjukkan bahwa analisis data sekunder adalah cara yang efektif untuk menganalisis data ketika ada kesulitan mengakses sampel yang sulit dijangkau, dan ketika berhadapan dengan masalah yang sangat sensitif, populasi kecil dan fenomena langka.

Manfaat lain termasuk meningkatkan kendali mutu dengan memverifikasi penelitian asli, sehingga menambah transparansi, kepercayaan, dan kredibilitas temuan asli. Manfaat akhir dan penting dari analisis data sekunder

adalah bahwa hal itu diakui sebagai alat pengajaran dan pembelajaran yang berharga bagi peneliti pemula (Glaser, 1963). Menganalisis ulang data yang ada memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran pengalaman tentang masalah substantif dan / atau metodologi tertentu dan, dengan demikian, melindungi peserta penelitian potensial sementara siswa belajar bagaimana melakukan penelitian dengan cara yang aman (Brewer, 2006).

Terlepas dari semua hal positif, analisis data sekunder memiliki kritik. Sejumlah penulis menyoroti kelemahan dari analisis ulang data wawancara termasuk hilangnya kendali atas pengumpulan data (Brewer, 2006, Szabo & Strang 1997), kurangnya pengetahuan dan informasi seputar pengalaman wawancara, dan ketidakmampuan untuk mengajukan pertanyaan dan menyelidiki tentang tema yang muncul dalam wawancara berikutnya (Bishop, 2007; Szabo & Strang 1997) (Andrews et al. 2012).

Data sekunder utama yang akan digunakan adalah data IPG dan IDG series lima tahun, termasuk komposit pembentuknya. Proses analisis sekunder Dalam melakukan penelitian, bidang penyelidikan dan pertanyaan penelitian menentukan metode yang peneliti ikuti. Metode penelitian terdiri dari bagaimana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam penelitian (Creswell, 2009).

Analisis sekunder merupakan metode sistematis dengan langkah-langkah prosedural dan evaluatif, namun masih terdapat kekurangan literatur untuk mendefinisikan proses tertentu, dengan pengembangan pertanyaan penelitian, kemudian identifikasi dataset, evaluasi dataset. Tujuan keseluruhan dari metode ini adalah berkontribusi pada pengetahuan ilmiah melalui penawaran perspektif alternative. Peneliti dapat memanfaatkan data berkualitas tinggi yang tersedia dan mempertimbangkan nilai potensial dalam memperoleh pengetahuan dan memberikan wawasan tentang berbagai masalah melalui pemanfaatan metode analisis data sekunder (Johnston 2014).

Analisis data sekunder yang berhasil membutuhkan proses sistematis yang mengakui tantangan dalam memanfaatkan data yang ada dan membahas karakteristik analisis sekunder yang berbeda. Proses ini mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan

keterbatasan. Sejumlah besar data yang dikumpulkan, dikompilasi, dan dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

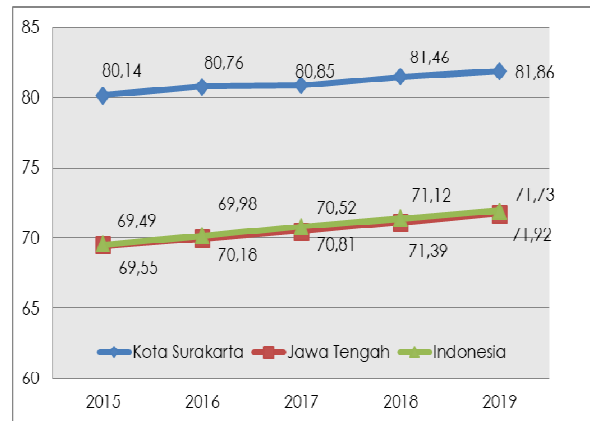
3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dasar dalam pengukuran IPG adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPG memiliki kriteria pembentuk yang sama dengan IPM, hanya saja IPG mempersandingkan kondisi laki-laki dan perempuan. BPS merumuskan IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. (https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/in_dikator/14#:~:text=IPG%20merupakan%20indeks%20pencapaian%20kemampuan,IPM%20dengan%20memperhatikan%20ketimpangan%20gender.&text=IPG%20dapat%20digunakan%20untuk%20mengetahui,nilai%20IPM%20sama%20dengan%20IPG.)

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

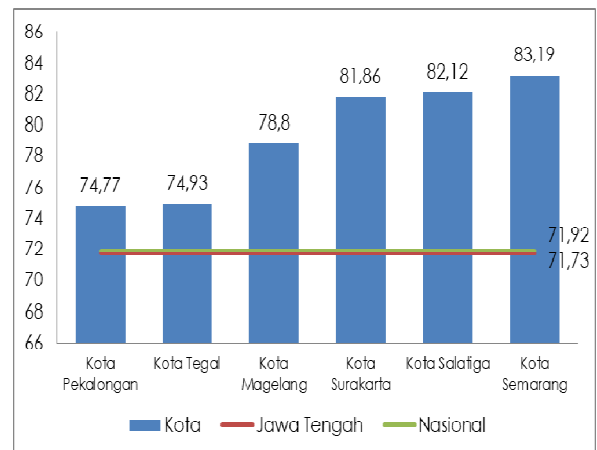
IPM Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami perkembangan meningkat yaitu, dari sebesar 79,34 menjadi sebesar 81,46. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengamali peningkatan. Kondisi IPM Kota Surakarta bahkan melebihi capaian Jawa Tengah dan Indonesia. Gambaran capaian IPM dapat disimak pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1 : IPM Kota Surakarta Jawa Tengah dan Indonesia 2015-2019

Sumber: Diolah dari Data BPS Jawa Tengah,2020

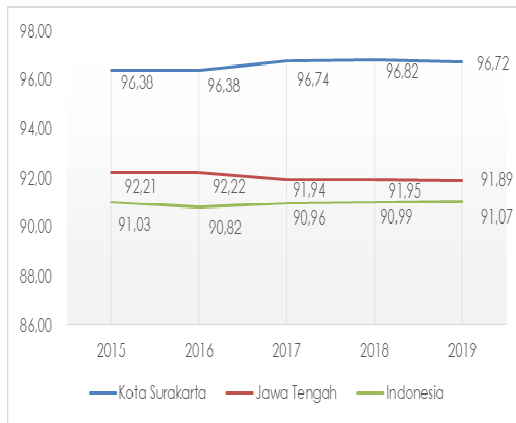
Jika diperbandingkan dengan Kota di Jawa Tengah posisi Kota Surakarta berada diantara Kota Salatiga dan Kota Magelang. Kota Surakarta berada di posisi ketiga. Hal ini dapat disimak pada gambar berikut ini :



Gambar 2 : Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2019.

Sumber: Diolah dari data BPS Jawa Tengah,2020

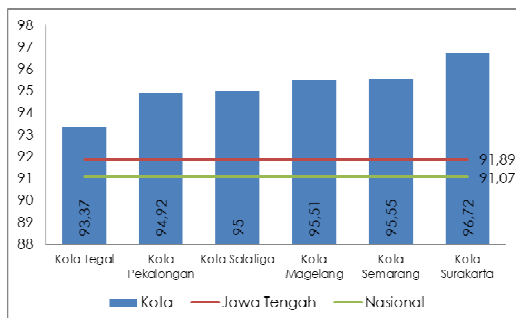
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019, dari sebesar 96,48 pada tahun 2014 menjadi sebesar 96,72 pada tahun 2019. Sayangnya capaian tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018. Gambaran selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :



Gambar 1 : IPG Kota Surakarta Jawa Tengah dan Indonesia 2015-2019
 Sumber: Diolah dari data BPS Jawa Tengah,2020

Capaian IPG Kota Surakarta meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai yang dicapai melebihi capaian Jawa Tengah dan Indonesia. Ini menunjukkan IPG semakin mendekati IPM dan kesenjangan gender lebih baik dibandingkan dengan posisi Jawa Tengah maupun Indonesia.

Jika diperbandingkan dengan Kota-kota lain di Jawa Tengah capaian IPG Kota Surakarta menempati posisi tertinggi. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :



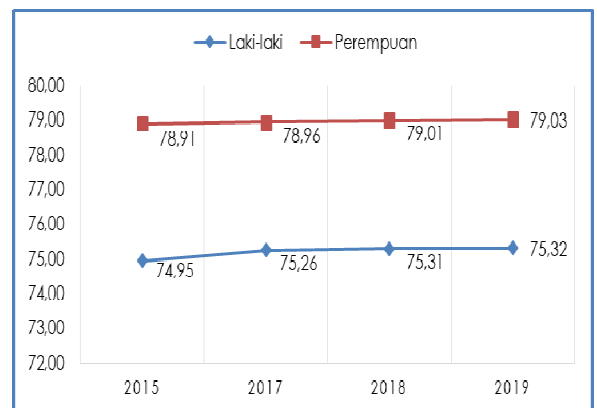
Gambar 4 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2019.
 Sumber: Diolah dari Data BPS Jawa Tengah,2020

Pembentuk IPG adalah : (1) Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Rata-rata Harapan Lama Sekolah (RHLS) dan Pengeluaran Rata-rata perkapita.

Angka harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

Harapan hidup saat lahir dapat diperkirakan dalam situasi tertentu. Harapan hidup meningkat setelah kelangsungan hidup anak di tahun-tahun awal, dan kehidupan itu harapan saat lahir bukanlah usia rata-rata pada yang orang dewasa meninggal (Zakrzewski 2015).

Angka Harapan Hidup menurut jenis kelamin Kota Surakarta tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya, yaitu angka harapan hidup laki-laki pada tahun 2019 sebesar 74,95 tahun meningkat menjadi sebesar 75,32 tahun pada tahun 2019. Sama halnya dengan perempuan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 78,91 tahun naik menjadi 79,03 tahun. Selengkapnya dapat disimak pada gambar dibawah ini.



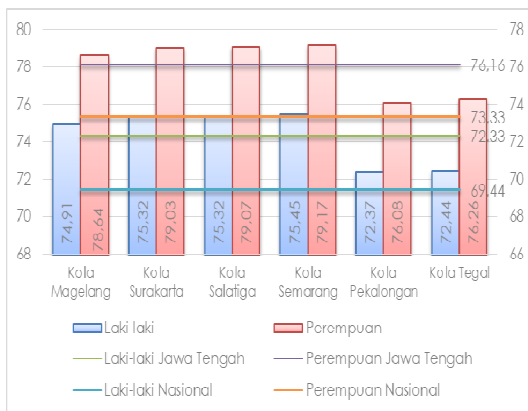
Gambar 6 : AHH Laki-laki dan Perempuan Kota Surakarta 2015-2019
 Sumber : Diolah dari data BPS 2020

Data tersebut menunjukkan AHH laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Sejak 1900, rata-rata nasional peningkatan harapan hidup di negara berkembang negara telah 71 persen untuk perempuan dan 66 persen untuk pria. Peningkatan ini tidak bisa dijelaskan secara fisiologis atau teori evolusi. Perubahan cepat dalam pengetahuan kesehatan, penyakit, perubahan gaya hidup dan perilaku, dan kemajuan dalam bidang medis teknologi telah sangat meningkat kemungkinan kedua jenis kelamin untuk hidup usia tua.

Dalam dua dekade terakhir, telah terjadi perlambatan yang signifikan dalam perpanjangan harapan hidup pada perempuan. Beberapa peneliti merasa bahwa perempuan di negara maju mampu mencapai batas alamiah manusia dalam hidup. Beberapa sosiolog mengemukakan usia harapan hidup laki-laki yang lebih rendah karena mereka cenderung merokok, minum, dan bekerja di luar rumah, menderita penyakit yang secara tradisional dianggap "maskulin", dan

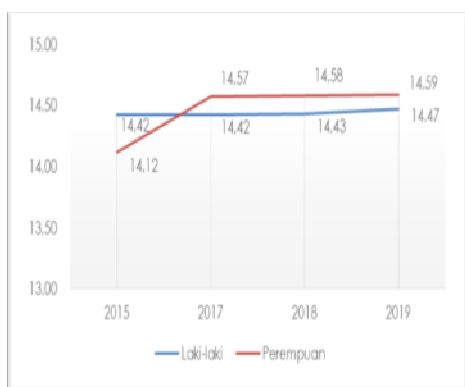
kanker paru-paru yang kondisinya hampir tiga kali lipat pada perempuan (Perls and Fretts 2017).

Posisi relatif Angka harapan hidup Kota Surakarta tahun 2019 untuk laki-laki sebesar 75,32 tahun, berada di atas rata-rata laki-laki nasional (69,44 tahun) dan laki-laki provinsi (72,33 tahun), serta capaiannya tertinggi kedua setelah kota Semarang. Sedangkan angka harapan hidup untuk perempuan pada tahun 2019 sebesar 79,03 tahun, berada di atas rata-rata perempuan provinsi (76,16 tahun) dan Nasional (73,33 tahun), serta tertinggi kedua setelah Kota Semarang. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



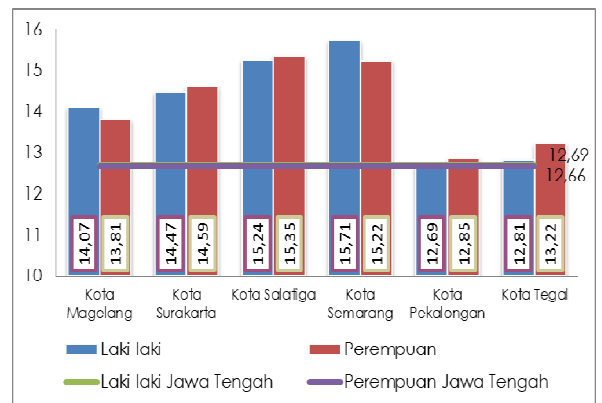
Gambar 7 : Perbandingan AHH Laki-laki dan Perempuan Kota-kota di Jawa Tengah 2019
Sumber : Diolah dari data BPS 2020

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kota Surakarta pada tahun 2015 hingga tahun 2019 masing-masing mengalami perkembangan positif karena angkanya meningkat. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki pada tahun 2015 sebesar 14,42 tahun meningkat menjadi sebesar 14,47 tahun pada tahun 2019.



Gambar 7 : Harapan Lama Sekolah Kota Surakarta 2015-2019
Sumber : Diolah dari data BPS 2020

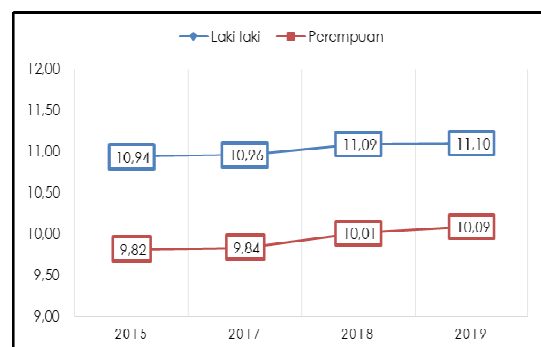
Posisi relatif harapan lama sekolah tahun 2019 untuk laki-laki sebesar 14,47 tahun berada di atas rata-rata laki laki Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,69 tahun, serta berada di posisi ketiga tertinggi setelah Kota Semarang dan Kota Salatiga. Harapan lama sekolah perempuan Kota Surakarta tahun 2019 sebesar 14,59 tahun berada di atas rata-rata perempuan Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,66 tahun, serta berada diposisi ke tiga tertinggi setelah Kota Semarang dan Kota Salatiga. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 8 : Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2019

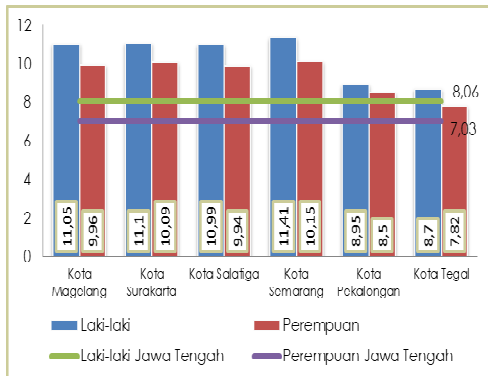
Sumber : Diolah dari Data BPS 2020.

Berkaitan dengan rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin tahun 2015 hingga tahun 2019 posisi laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah laki-laki pada tahun 2015 sebesar 10,94 tahun naik menjadi sebesar 11,10 tahun 2019 dan perempuan tahun 2015 sebesar 9,82 tahun naik menjadi sebesar 10,09 tahun 2019.



Gambar 9: Rata-rata Lama Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin 2015-2019
Sumber : Diolah dari Data BPS 2020

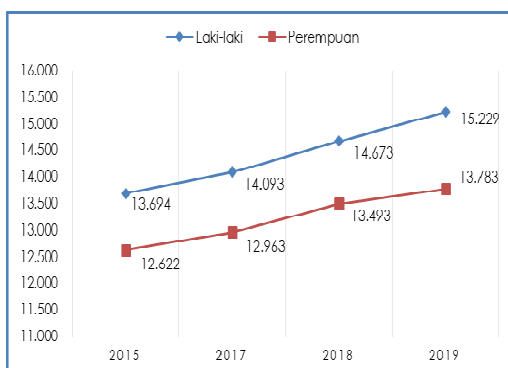
Posisi relatif rata-rata lama sekolah tahun 2019 untuk laki-laki sebesar 11,10 tahun berada di atas rata-rata laki-laki Provinsi (8,06 tahun) serta posisi kedua tertinggi setelah Kota Semarang (11,41 tahun). Rata-rata lama sekolah untuk perempuan Kota Surakarta pada tahun 2019 sebesar 10,09 tahun, berada di atas rata-rata perempuan provinsi (7,03 tahun) dan tertinggi ke kedua setelah Kota Semarang (10,15 tahun). Secara rinci dapat simak pada gambar berikut.



Gambar 10 : Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2019

Sumber : Diolah dari Data BPS 2020.

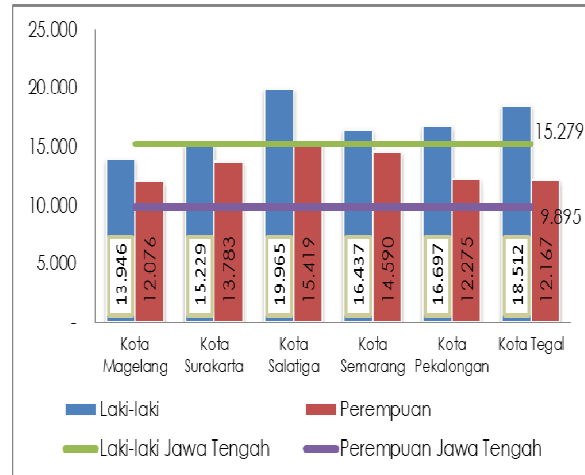
Komposit IPG yaitu pengeluaran perkapita. Angka tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan, yaitu untuk laki-laki pada tahun 2015 sebesar Rp. 13.694 ribu naik menjadi sebesar Rp.15.229 ribu pada tahun 2019. Sedangkan untuk perempuan mengalami peningkatan dari 12.622 ribu di tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 13.783 ribu pada tahun 2019. Selengkapnya dapat disimak pada gambar dibawah ini.



Gambar 11 : Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2015-2019

Sumber : Diolah dari Data BPS 2020.

Posisi relatif pengeluaran perkapita tahun 2019 untuk laki-laki sebesar Rp.15.229 ribu berada di bawah rata-rata laki-laki Provinsi (Rp.15.279 ribu) serta posisi terendah kedua setelah Kota Magelang (Rp.13.946 ribu). Sedangkan pengeluaran perkapita untuk perempuan Kota Surakarta pada tahun 2019 sebesar Rp.13.783 ribu, berada di atas rata-rata perempuan provinsi (Rp.9.895 ribu) dan tertinggi ketiga setelah Kota Salatiga dan Kota Semarang.



Gambar 12 : Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2015-2019

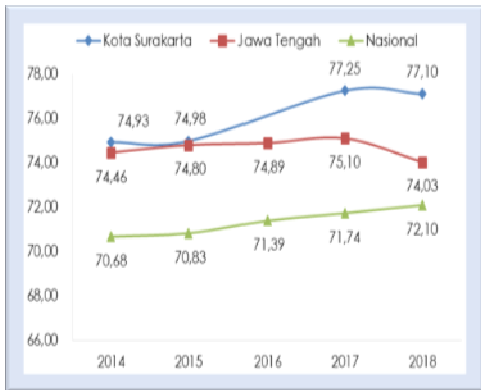
Sumber : Diolah dari Data BPS 2020.

3.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

BPS mendefinisikan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik (<https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html>). Dimensi mengandu tiga unsur penting yaitu perempuan di legislative, perempuan professional dan kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga.

Kementerian PPPA merumuskan IDG adalah mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknis. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019).

Perkembangan IDG Kota Surakarta tahun 2014 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebesar 74,93 naik menjadi sebesar 77,10 pada tahun 2018. Kondisi ini menurun dari tahun 2017 ke 2018, sama dengan kondisi Jawa Tengah yang mengalami penurunan. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :



Gambar 13: IDG Kota Surakarta 2014-2018.
Sumber : Diolah dari buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015-2019

Capaian IDG Kota Surakarta berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah namun jika dibandingkan dengan capaian kota lainnya di Jawa Tengah, IDG Kota Surakarta menempati posisi ketiga setelah Kota Salatiga dan Kota Tegal. Keberhasilan Kota Tegal dan Salatiga diantaranya karena indikator pembentuk IDG yaitu eremuan di legislative memiliki capai diatas penetapan quota 30%. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut.

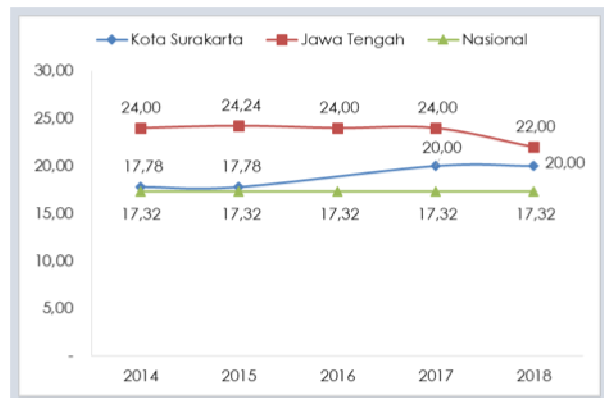


Gambar 14 : Capaian IDG Kota di Jawa Tengah Tahun 2018
Sumber : Diolah dari Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender, KPPPA 2019.

IDG adalah pembuktian bahwa perempuan diberdayakan dan memilikipotensi yang layak untuk diperhitungkan. IDG diyakini signifikan, karena negara-negara yang tidak memanfaatkan potensi penuh perempuan, yang merupakan setengah dari masyarakat mereka, dikatakan meremehkan potensi ekonomi (Ismail, Mohd Rasdi, and Jamal 2011).

Komponen pembentuk IDG yaitu perempuan di parlemen diukur dari persentase perempuan yang menduduki kursi di DPRD. Untuk mencapai hal ini pemerintah menetapkan quota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Penetapan kuota 30% perempuan dalam pemilu legislatif adalah sebuah affirmative action yang telah lama diperjuangkan oleh aktivis perempuan (Kertati 2014).

Capaian perempuan di DPRD Kota Surakarta mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2018. Seengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :

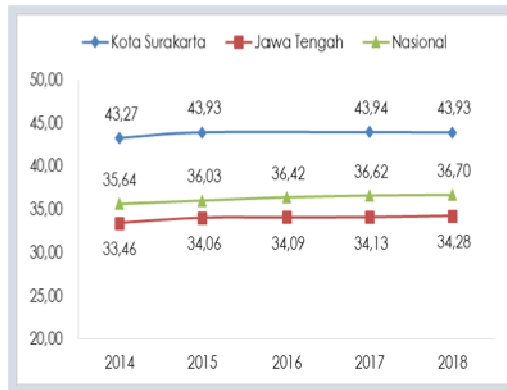


Gambar 15 : Perempuan di DPRD
Sumber : Diolah dari Buku Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender, KPPPA 2015-2019.

Memperhatikan capaian tersebut baik Kota Surakarta maupun Jawa Tengah dan Nasional belum mencapai syarat pemenuhan quota 30%. Perempuan anggota parlemen merupakan figur penting dalam politik, karena politik adalah tentang fungsi publik dari seorang individu. Politik telah menjadi salah satu bidang di mana perubahan rasio laki-laki-perempuan mudah terlihat karena jumlah individu dalam posisi politik di negara mana pun pada titik mana pun (Ismail, Mohd Rasdi, and Jamal 2011).

Capaian indikator lain dari IDG adalah perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi. Pada indikator ini Kota Surakarta

pada tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami perkembangan yang cenderung stagnan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 43,27% dan tahun 2018 sebesar 43,93%. Walaupun perkembangan capaian indikator ini bahkan cenderung menurun dari capaian tahun 2017 ke 2018, namun kondisinya lebih baik dari capaian Jawa Tengah dan Nasional. Data selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut:



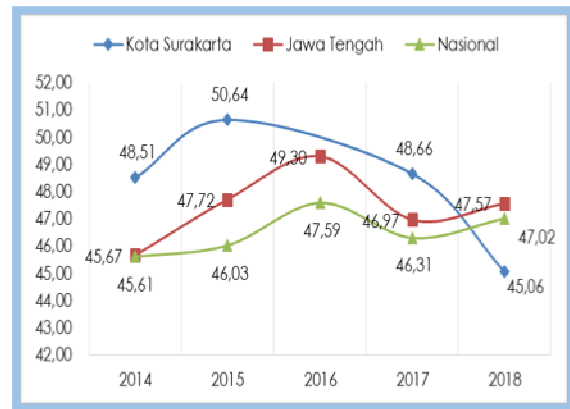
Gambar 16: Capaian Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi.

Sumber : Diolah dari Buku Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender, KPPPA 2015-2019.

Pencapaian ini dapat dilihat dari peran perempuan baik di eksekutif maupun swasta. Kota Surakarta merupakan kota dengan jumlah UMKM yang potensial dan sebagian besar dikelola oleh perempuan. Pencapaian ini juga karena upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menggerakkan sector UMKM yang sangat progresif menaikkan angka capaian indikator ini.

Hal ini sesuai dengan pemenuhan tujuh prasyarat PUG sebagaimana yang tertuang dalam permen PPPA nomor 7 tahun 2018, dimana salah satu prasyarat yang harus ada dalam mendorong implementasi PUG adalah partisipasi masyarakat (Kertati 2019). Meletakkan tanggung jawab bersama dalam menggapai indikator ini tidak bisa dilakukan harus dari dua sisi yaitu pemerintah daerah dan masyarakat.

Indikator ketiga dalam pencapaian IDG adalah Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja. Pencapaian Kota Surakarta pada tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami perkembangan menurun, yaitu pada tahun 2014 sebesar 48,51% dan pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar 45,06%. Selengkapnya dapat disimak pada gambar dibawah ini.



Gambar 17 : Capaian Kontribusi Pendapatan Perempuan tahun 2014-2018

Sumber : Diolah dari Buku Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender, KPPPA 2015-2019.

Posisi Kota Surakarta menurun dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Beberapa sebab turunnya kontribusi pendapatan keluarga ini adalah makin jauhnya aksesibilitas perempuan dalam mencapai profesionalitas. Perdagangan online yang makin marak telah mendesak posisi perempuan yang biasa bekerja di wilayah UMKM. Perempuan pekerja profesional mengambil bagian untuk bekerja di rumah sehingga dapat melakukan fungsi domestic sebagai ibu rumah tangga.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi pertumbuhan jumlah tenaga kerja perempuan dari 2018 ke 2019. Pada 2018, tercatat 47,95 juta orang perempuan yang bekerja. Jumlahnya meningkat setahun setelahnya menjadi 48,75 juta orang. Namun proporsi perempuan terhadap total pekerja menurun, dari 38,66% menjadi 38,53% pada 2019

(<https://databoks.katadata.co.id/datapublik/2020/10/14/perempuan-mendominasi-tenaga-kerja-usaha-jasa>)

Pekerja perempuan paling banyak berperan sebagai tenaga usaha jasa. Dominasinya mencapai 58,04% dibanding pekerja tenaga usaha jasa laki-laki di 2019. Kondisi tersebut naik 0,87% dibanding tahun sebelumnya. Perempuan bekerja sebagai tenaga usaha jasa sebesar 58,91% dibanding laki-laki. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublik/2020/10/14/perempuan-mendominasi-tenaga-kerja-usaha-jasa>).

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: (1) IPG dan IDG

Kota Suarakarta secara keseluruhan berada diatas capaian rata-rata Jawa Tengah; (2) beberapa indikator yang masih belum menguat untuk IPG adalah rata-rata lama sekolah, untuk IPG adalah persentase perempuan di DPRD dan kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga; (3) penurunan beberapa indikator ini selain disebabkan aksesibilitas yang masih belum optimal terhadap sumberdaya pembangunan, juga karena unsur domestifikasi yang masih kuat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Agnes Higgins, Michael Waring, and Joan Lalor. 2012. "Using Classic Grounded Theory to Analyse Secondary Data: Reality and Reflections." *Grounded Theory Review* 11: 12–26.
- Bappenas, Kementerian P P N. 2020. *NARASI RPJMN 2020-2024*.
- BPS. 2019. *Boklet Survei Angkatan Kerja 2019*. [https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NjgwYzNmM5L2Jvb2tsZXQtc3VydmVpLWVpZ2thdGFuLWtlcmphLW5hc2lvaW50dXN0dXMtMjAxOS5odG1s&twoadfnofearfeauf=MjAyMS0wMS0xOCyMDozNzowNQ%3D%3D](https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NjgwYzM0YzNhOGM0OTU1YzIzNTg5MmM5&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmklL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMTkvMTIvMTAvNjgwYzNmM5L2Jvb2tsZXQtc3VydmVpLWVpZ2thdGFuLWtlcmphLW5hc2lvaW50dXN0dXMtMjAxOS5odG1s&twoadfnofearfeauf=MjAyMS0wMS0xOCyMDozNzowNQ%3D%3D).
- Ismail, Maimunah, Roziah Mohd Rasdi, and Akhmal Jamal. 2011. "Gender Empowerment Measure in Political Achievement in Selected Developed and Developing Countries." *Gender in Management: An International Journal* 26: 380–92.
- Johnston, Melissa P. 2014. "Secondary Data Analysis : A Method of Which the Time Has Come." : 619–26.
- Kertati, Indra. 2014. "Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen." *Jurnal Riptek* 8(1): 19–32. <http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2015/08/3.-Implementasi-Quota-indra-kertati.pdf>.
- . 2019. "EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KOTA SEMARANG." *Riptek, Jurnal* 13(1): 57–64.
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian. 2019. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*. 1st ed. eds. Wisnu Winardi, Yoyo Karyono, Sylvianti Angraini, and Anugrah Pambudi Raharjo. Jakarta: KPPPA-BPS. <https://www.kemennpppa.go.id/lib/uploads/lis/t/44ac0-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2019.pdf>.
- Perls, Tom, and Ruth C Fretts. 2017. "Why Women May Live Longer than Men Do? A Telomere-Length Regulated and Diet-Based Entropic Assessment." (November 1997).
- RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. BPS. <https://www.kemennpppa.go.id/lib/uploads/lis/t/71ad6-buku-ktpa-meneg-pp-2017.pdf>.
- RI, Pemerintah. 2000. 2004 *Inpres 9 Tahun 2000*.
- UNDP. 2019. *Indonesia Masuk Dalam Kelompok IPM Tinggi*. <https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/presscenter/pressreleases/2019/Indonesia-masuk-ke-dalam-kelompok-kategori-pembangunan-manusia-tinggi.html>.
- Zakrzewski, Sonia R. 2015. *Life Expectancy*.